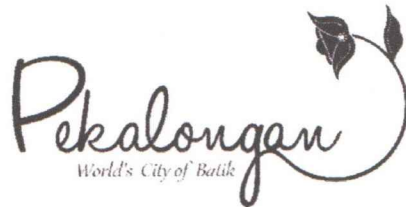


**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BKD KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2020**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 - 429451

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

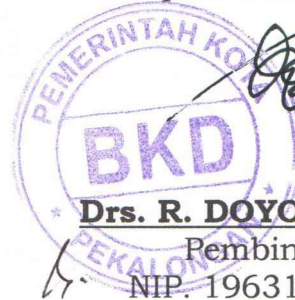
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, Agustus 2020

Kepala BKD Kota Pekalongan,



Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TH 2020.....	6
2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN.....	14
3.1 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota	14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD	15
3.3 Program dan Kegiatan.....	16
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	19
4.1. Rencana Kerja	19
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah	22
BAB V : PENUTUP	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan peraturan peralihannya dimana menyebutkan setiap Pemerintah di Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 20 tahun, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan jangka waktu pembangunan selama 5 tahun.

Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tersebut dituangkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan mencakup sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra).

Hal tersebut diatas kemudian diatur dan didasari juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2020.

Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan atas Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya;
 25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan Tahun 2004-2013;
 26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
 27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
 28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
 29. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
 30. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

1.3 Maksud Dan Tujuan

Perubahan atas Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk:

A. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai pedoman atau acuan bagi pihak-pihak kepentingan baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Pekalongan dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam menciptakan kesepkatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pekoangan 2016-2021. Serta sebagaian acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2021.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dengan pembanding Renja Tahun sebelumnya maupun Tahun yang akan datang;
4. Pedoman dalam menyusun dokumen perubahan rencana agenda pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020;
5. Penetapan Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Keuangan Dearah Kota Pekalongan yang direncanakan dalam pembebanan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2020.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan 1 urusan 6 program dengan 65 kegiatan, dengan capaian realisasi target kinerja output kegiatan dan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

Tabel 2.1

Realisasi Target Kinerja dan Anggaran BKD Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	RENJA			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	TW I	TW II			
300201	BADAN KEUANGAN DAERAH						13.270.940.000		
30	URUSAN PENUNJANG						13.270.940.000		
3002	KEUANGAN						13.270.940.000	4.952.345.824	
3002.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	persen	100			1.773.200.000	612.697.848	
		% pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, Cetak , Penggandaan dan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	persen	100					
3002.300201.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	3	3	3.000.000	821.000	
3002.300201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	3	3	506.400.000	224.385.392	
3002.300201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	3	3	103.000.000	67.650.000	
3002.300201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	3	3	93.000.000	45.000.000	
3002.300201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	3	3	190.000.000	106.385.000	
3002.300201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	3	3	82.300.000	7.428.250	
3002.300201.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	3	3	10.000.000	1.044.500	
3002.300201.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	3	3	13.000.000	12.291.300	
3002.300201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	3	3	2.500.000	895.000	
3002.300201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	11	3	3	120.000.000	44.296.000	
3002.300201.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang/kali	300	84	9	650.000.000	102.501.406	
3002.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			0			591.140.000	68.128.899	
3002.300201.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4			0			0		
3002.300201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	1	0	0	60.000.000	4.768.000	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	RENJA			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	TW I	TW II			
3002.300201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	58	32	18	166.140.000	34.444.399	
3002.300201.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	unit	1	0	0	200.000.000	-	
3002.300201.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	19	3	0	125.000.000	5.565.000	
3002.300201.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	3	3	40.000.000	23.351.500	
3002.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100			31.500.000	2.916.000	
3002.300201.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun	laporan	6	0	3	10.000.000	540.000	
3002.300201.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun	laporan	6	2	2	10.000.000	2.376.000	
3002.300201.06.007	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun	dokumen	1	0		8.000.000	-	
3002.300201.06.008	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPIP yang disusun	dokumen	5	0	0	3.500.000	-	
3002.07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)	Persentase pengaduan masyarakat	persen	0			46.640.000	14.459.060	
3002.300201.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	orang/bulan	1	3	3	31.640.000	14.459.060	
3002.300201.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik	kali	3	0	0	15.000.000	-	
3002.36	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	persen	4			1.977.000.000	338.216.400	
		Presentase Peningkatan Potensi Pendapatan	persen	4					
3002.300201.36.002	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah WP/ WR yang dilayani	WP/WR	2.500	5.314	4.580	370.000.000	152.708.400	
3002.300201.36.003	Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	Lembar	90.000	2.700	2692	70.000.000	38.350.000	
3002.300201.36.006	Pemutakhiran data PBB	Jumlah data Objek Pajak PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate	Data	16.000	0	0	630.000.000	-	
		Jumlah Peta Digital PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate	Peta	10	0	0			
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2020 disusun	Buku	1	1	0			
		Jumlah Buku DHKP PBB 2020 yang disusun	Buku	94	93	0			
		Jumlah berkas permohonan Pelayanan PBB yang diproses dan diselesaikan	berkas	2.000	581	717			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	RENJA			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	TW I	TW II			
3002.300201.36.008	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	laporan	12	3	3	110.000.000	51.590.000	
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun	dokumen	2	0	1			
		Jumlah rakor bidang pendapatan yang diselenggarakan	kali	6	2	2			
3002.300201.36.011	Pengembangan SIM pendapatan daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	Aplikasi	2	0	0	365.000.000	18.300.000	
		Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan	Aplikasi	5	0	0			
		Jumlah Sistem Informasi baru yang diadakan	aplikasi	2	0	0			
3002.300201.36.012	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	Lembar	92.000	90.677	741	325.000.000	37.768.000	
3002.300201.36.017	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata	Objek	2.000	900	500	107.000.000	39.500.000	
		Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun	Buku	1	0	0			
		Jumlah Objek Pajak Khusus PBB yang didata	OP	10	0	0			
3002.37	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	persen	63			5.119.500.000	3.212.237.100	
		Persentase OPD yang menyelesaikan laporan aset tetap	persen	100					
		Persentase OPD yang menyelesaikan laporan persediaan	persen	100					
3002.300201.37.001	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	buku	2	0	0	100.000.000	-	
3002.300201.37.002	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang disusun	buku	2	0	0	50.000.000	7.238.000	
3002.300201.37.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	1	0	0	118.500.000	27.000.000	
3002.300201.37.004	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	Jumlah Sertifikat yang diajukan	bidang	32	0	3	286.000.000	3.265.000	
		Jumlah papan nama aset yang diadakan	buah	55					
		Jumlah Patok batas tanah yang diadakan	patok	600	0	0			
		Jumlah bidang tanah milik Pemkot yang diinventarisasi	bidang	250	0	0			
3002.300201.37.005	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah lelang garapan eks tanah bengkok yang dilaksanakan	kali	5	5	0	67.000.000	21.350.000	
3002.300201.37.006	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	OPD	30	0	30	673.000.000	145.734.000	
		Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	Unit Kerja	36	0	36			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	RENJA			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	TW I	TW II			
		Jumlah laporan/data pengelolaan BMD	Laporan	67	0	67			
		Jumlah Sensus BMD yang dilaksanakan	kali	1	0	0			
3002.300201.37.007	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	jenis	3	0	0	200.000.000	8.030.000	
3002.300201.37.008	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan	unit	8	8	0	3.245.000.000	2.955.520.100	
3002.300201.37.009	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah			0			0		
3002.300201.37.010	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat	unit	2	0	0	350.000.000	44.100.000	
3002.300201.37.011	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	unit	3	0	0	30.000.000	-	
3002.38	PROGRAM PENYUSUNAN APBD DAN PENGELOLAAN HIBAH BANSOS	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	persen	100			1.429.000.000	294.654.500	
		Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	persen	100					
		Ketersediaan Perda dan Perwal Perubahan APBD yang tepat waktu	persen	100					
3002.300201.38.001	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	2	2	0	350.000.000	13.941.750	
		Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	4	0	0			
3002.300201.38.002	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	2	0	0	286.000.000	121.262.250	
		jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	4	0	0			
3002.300201.38.003	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	bulan	12	3	3	128.000.000	62.964.083	
		Jumlah dokumen SOP hibah dan bansos yang disusun	dokumen	1	0	0			
		Jumlah raperwal santunan kematian yang disusun	raperwal	1	0	0			
3002.300201.38.004	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	kali	2	1	0	105.000.000	48.978.417	
3002.300201.38.005	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	PD/Unit Kerja	66	0	0	210.000.000	-	
3002.300201.38.006	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	bulan	12	3	3	350.000.000	47.508.000	
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	kali	6		6			

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	RENJA			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	TW I	TW II			
3002.39	PROGRAM PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	Persen	100			803.000.000	112.782.800	
3002.300201.39.001	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	Laporan	14	3	5	92.000.000	12.200.000	
3002.300201.39.002	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	Jumlah buku / Perwal yang disusun	Buku	1	0	0	50.000.000	-	
3002.300201.39.003	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel	bulan	12			262.000.000	36.120.000	
		pendampingan pengembangan aplikasi (SIMRAL)	paket	1	0	0			
3002.300201.39.004	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi						49.000.000	-	
		Jumlah Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan yang disusun	Laporan	7	0	0			
		Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi Semesteran yang disusun	Laporan	2	0	0			
3002.300201.39.005	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun	dokumen	2	0	0	350.000.000	64.462.800	
		Jumlah rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan	PD/Unit Kerja	67	67	0			
		Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (laporan keuangan konsolidasi) yang disusun	laporan	6	0	7			
		Jumlah publikasi laporan keuangan	kali	1	0	0			
3002.40	PROGRAM PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH	persentase Pencapaian target pendapatan Pajak	persen	100			913.460.000	144.606.717	
		persentase Pencapaian target pendapatan Retribusi	persen	100					
3002.300201.40.001	Penagihan pajak dan retribusi daerah	Jumlah masa pajak yang dibayar	objek pajak	21.200	8870	7733	226.800.000	71.010.000	
3002.300201.40.002	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi	WP/WR	150	0	0	260.000.000	-	
3002.300201.40.003	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Reklame, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Pajak	kali	50	13	15	172.660.000	45.398.717	
3002.300201.40.004	Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	berkas	1.500	189	300	144.000.000	26.766.000	
3002.300201.40.005	Pemeriksaan pajak daerah	Jumlah Objek Pajak/WP yang diperiksa	OP/WP	12	0	0	110.000.000	1.432.000	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	RENJA			Realisasi Kinerja		Anggaran	Realisasi	Ket
		Keluaran (Output)	Satuan	Target	TW I	TW II			
3002.300201.40.006	Gebyar Pajak Daerah			0	0	0	0		
3002.41	PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH	Persentase Penerbitan SP2D atas Pengajuan SPM dari OPD	persen	100			586.500.000	151.646.500	
		Persentase Pencairan SP2D atas Penerbitan SP2D	persen	100					
3002.300201.41.001	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jml. Dokumen raperda pengelolaan keuangan daerah yang disusun	dokumen	1	1	0	115.000.000	17.798.000	
3002.300201.41.002	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	bulan	12	3	3	65.000.000	17.977.000	
3002.300201.41.003	Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	laporan	12	3	3	32.000.000	-	
3002.300201.41.004	Fasilitasi pelaporan DAK	Jumlah laporan DAK per bidang yang disusun	laporan	30	3	3	45.500.000	13.486.500	
3002.300201.41.005	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	orang	240		160	28.000.000	12.060.000	
3002.300201.41.006	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	data	3.200	3.299	0	20.000.000	13.575.000	
3002.300201.41.007	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah bulan kegiatan updating data gaji dan pencetakan daftar gaji PNS se Kota Pekalongan	bulan	12	3	3	61.000.000	20.800.000	
3002.300201.41.008	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	PD/Unit Kerja	67	66	0	146.000.000	46.950.000	
3002.300201.41.009	Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah bulan pendampingan transaksi non tunai	bulan	12	3	3	74.000.000	9.000.000	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dengan beberapa aspek/ fokus sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan dengan diperolehnya opini WTP
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja BKD Tahun 2020 Triwulan II

No	Sasaran Strategis	Indikator		Kondisi Awal	Satuan	Capaian				Tahun 2020 Triwulan II		Target Akhir RPJMD 2021
						2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan.	12	Opini BPK terhadap LKD	WDP	indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	15	Kemandirian Daerah (Kontribusi PAD terhadap Pendapatan)	18,78	persen	20,83	20,96	19,80	40,17	10	n/a	22%

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BKD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

3.1 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BKD Kota Pekalongan, ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta BKD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel transparan pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi
BKD Kota Pekalongan Tahun 2020

MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Sebesar-Besarnya Bagi Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi LKjIP (AKIP) BKD
		Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas
		Persentase peningkatan PAD

Tabel 3.2
Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah
BKD Kota Pekalongan Tahun 2020

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2020		
1	2	3	4	5
9. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:				
Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terintegrasi berbasis kinerja, serta peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK atas LKD	WTP	Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	BKD
			Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	
			Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	
			Program Penyusunan APBD Dan Pengelolaan Hibah Bansos	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan BKD Kota Pekalongan. Tujuan jangka menengah BKD Kota Pekalongan adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BKD Kota Pekalongan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin

dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategi BKD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja BKD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja 2020
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi LKjIP (AKIP) BKD	85
			Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	100
			Persentase peningkatan PAD	10

3.3 Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
5. Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
6. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah

2. Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah

d. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

1. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
2. Promosi kegiatan unggulan dan inovatif

e. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
2. Penetapan pajak dan retribusi daerah
3. Pemutakhiran data PBB
4. Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
5. Pengembangan SIM pendapatan daerah
6. Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB
7. Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah

f. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

1. Penyusunan standar satuan harga
2. Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
4. Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah
5. Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok
6. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
7. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
8. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah
9. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah
10. Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
11. Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah

g. Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos

1. Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD
2. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
3. Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan social
4. Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran

h. Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan

1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2. Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah
3. Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
4. Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi
5. Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

i. Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah

1. Penagihan pajak dan retribusi daerah
2. Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah

3. Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
4. Verifikasi BPHTB
5. Pemeriksaan pajak daerah
6. Gebyar Pajak Daerah

j. Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah

1. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Fasilitasi MP TP-TGR
4. Fasilitasi pelaporan DAK
5. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
6. Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
7. Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji
8. Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
9. Pendampingan transaksi non tunai

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan menetapkan sasaran di Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2016-2021 yang ingin dicapai/diwujudkan sesuai dengan program kerja/rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, yaitu

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Dengan sasaran tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, yaitu:

1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
2. Nilai Evaluasi LKjIP (AKIP) BKD
3. Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas
4. Persentase peningkatan PAD

Dari 4 (empat) indikator kinerja utama tersebut untuk tahun 2020 dapat dijabarkan kedalam beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Tabel IKU, Program dan Kegiatan**

No	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
2	Nilai LKjIP (AKIP)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

No	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Profil Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3	Pelaporan Keuangan Daerah yang berkualitas (WTP)	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Penyusunan standar satuan harga Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok Peningkatan manajemen aset/barang daerah Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah
		Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
		Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah Pendampingan pengelolaan keuangan daerah Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
		Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Fasilitasi MP TP-TGR Fasilitasi pelaporan DAK Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPH Ps 21 PNS Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD Pendampingan transaksi non tunai Program peningkatan pendapatan daerah Penetapan pajak dan retribusi daerah
4	Persentase Peningkatan PAD	Program peningkatan pendapatan daerah	Pemutakhiran data PBB Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah Pengembangan SIM pendapatan daerah Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
			Optimalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah
			Penagihan pajak dan retribusi daerah
		Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
			Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
			Verifikasi BPHTB
			Pemeriksaan pajak daerah
			Gebyar Pajak Daerah

Pencapaian sasaran ini tercemin dalam indikator-indikator kinerja dan target kinerja. Target capaian kinerja di tahun ke-5 direncanakan dalam Perubahan Renstra BKD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target Kinerja Sasaran Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LKjIP (AKIP)	85
	Pelaporan Keuangan Daerah yang berkualitas	100
	Persentase Peningkatan PAD	10

Pengukuran keberhasilan dari capaian indikator kinerja di atas, dapat di gambarkan dengan keberhasilan pada pencapain setiap sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Fokus kegiatan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, penetapan pajak dan retribusi daerah, penertiban dan penyampain SPPT PBB, pendataan objek pajak dan retribusi daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu Persentase Peningkatan potensi pendapatan sebesar 4%.

b. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Fokus kegiatan adalah fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah, peningkatan manajemen aset/barang daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot sebesar 63%, Presentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap sebesar 100%, Persentase OPD yang menyesuaikan laporan Persediaan sebesar 100%.

c. Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos

Fokus kegiatan adalah Penyusunan Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD, penyusunan Raperwal tentang penjabaran APBD dan Perubahan APBD, fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu Ketersedian Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu

sebesar 100%, Presentase Penyaluran Hibah dan Bansos sebesar 100%.

d. Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan

Fokus kegiatan adalah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, dan pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu Presentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP sebesar 100%.

e. Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah

Fokus kegiatan adalah penagihan pajak dan restribusi daerah, pengembangan dan penyuluhan pajak dan restribusi daerah, dan pemeriksaan pajak daerah pemeriksaan pajak daerah dalam rangka mendukung target indikator 2020 yaitu Presentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak sebesar 100%, Presentase Pencapaian Target Pendapatan Restribusi sebesar 100%.

f. Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah

Fokus kegiatan adalah pengendalian dan penertiban dokumen penatausahaan keuangan SKPKD dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu Persentase Penertiban SP2D atas pengajuan SPM dari OPD sebesar 100% Persentase Pencairan SP2D atas penertiban SP2D sebesar 100%.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja di butuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegoatan prioritas di Badan Keuangan Daerah tahun 2019. Kebutuhan pendanaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perbandingan Renja 2019 dengan Perubahan Renja 2019

No	Kegiatan	Renja 2019	Perubahan Renja 2019	+ / -
300201	BADAN KEUANGAN DAERAH			
30	URUSAN PENUNJANG			
3002	KEUANGAN	13.270.940.000	11.272.916.000	1.998.024.000
3002.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.773.200.000	1.590.900.000	182.300.000
3002.300201.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	6.000.000	(3.000.000)
3002.300201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	506.400.000	506.400.000	-
3002.300201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	103.000.000	135.000.000	(32.000.000)
3002.300201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	93.000.000	93.000.000	-
3002.300201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	190.000.000	190.000.000	-
3002.300201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	82.300.000	50.000.000	32.300.000
3002.300201.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	5.000.000	5.000.000
3002.300201.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	13.000.000	28.000.000	(15.000.000)
3002.300201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	-
3002.300201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	120.000.000	100.000.000	20.000.000
3002.300201.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	650.000.000	475.000.000	175.000.000
3002.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	591.140.000	586.140.000	5.000.000

No	Kegiatan	Renja 2019	Perubahan Renja 2019	+ / -
3002.300201.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	-	-	-
3002.300201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000	80.000.000	(20.000.000)
3002.300201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	166.140.000	131.140.000	35.000.000
3002.300201.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000	150.000.000	50.000.000
3002.300201.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	125.000.000	175.000.000	(50.000.000)
3002.300201.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	40.000.000	50.000.000	(10.000.000)
3002.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	31.500.000	23.500.000	8.000.000
3002.300201.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	-
3002.300201.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	-
3002.300201.06.007	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	8.000.000	-	8.000.000
3002.300201.06.008	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	3.500.000	3.500.000	-
3002.07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)	46.640.000	31.640.000	15.000.000
3002.300201.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	31.640.000	31.640.000	-
3002.300201.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	15.000.000	-	15.000.000
3002.36	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	1.977.000.000	1.096.970.000	880.030.000
3002.300201.36.002	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	370.000.000	367.270.000	2.730.000
3002.300201.36.003	Penetapan pajak dan retribusi daerah	70.000.000	55.050.000	14.950.000
3002.300201.36.006	Pemutakhiran data PBB	630.000.000	122.680.000	507.320.000
3002.300201.36.008	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	110.000.000	105.000.000	5.000.000
3002.300201.36.011	Pengembangan SIM pendapatan daerah	365.000.000	90.800.000	274.200.000
3002.300201.36.012	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	325.000.000	299.170.000	25.830.000
3002.300201.36.017	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	107.000.000	57.000.000	50.000.000
3002.37	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	5.119.500.000	5.141.874.000	(22.374.000)
3002.300201.37.001	Penyusunan standar satuan harga	100.000.000	100.000.000	-
3002.300201.37.002	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	50.000.000	50.000.000	-
3002.300201.37.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	118.500.000	118.500.000	-
3002.300201.37.004	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	286.000.000	756.850.000	(470.850.000)
3002.300201.37.005	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	67.000.000	58.800.000	8.200.000
3002.300201.37.006	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	673.000.000	622.624.000	50.376.000
3002.300201.37.007	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	200.000.000	119.100.000	80.900.000
3002.300201.37.008	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	3.245.000.000	3.136.000.000	109.000.000
3002.300201.37.009	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah	0	-	-
3002.300201.37.010	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	350.000.000	150.000.000	200.000.000
3002.300201.37.011	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	30.000.000	30.000.000	-

No	Kegiatan	Renja 2019	Perubahan Renja 2019	+ / -
3002.38	PROGRAM PENYUSUNAN APBD DAN PENGELOLAAN HIBAH BANSOS	1.429.000.000	1.116.072.000	312.928.000
3002.300201.38.001	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	350.000.000	291.000.000	59.000.000
3002.300201.38.002	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	286.000.000	351.600.000	(65.600.000)
3002.300201.38.003	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	128.000.000	106.000.000	22.000.000
3002.300201.38.004	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	105.000.000	96.000.000	9.000.000
3002.300201.38.005	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	210.000.000	209.472.000	528.000
3002.300201.38.006	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	350.000.000	62.000.000	288.000.000
3002.39	PROGRAM PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	803.000.000	689.600.000	113.400.000
3002.300201.39.001	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	92.000.000	92.000.000	-
3002.300201.39.002	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	50.000.000	-	50.000.000
3002.300201.39.003	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	262.000.000	247.600.000	14.400.000
3002.300201.39.004	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	49.000.000	-	49.000.000
3002.300201.39.005	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	350.000.000	350.000.000	-
3002.40	PROGRAM PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH	913.460.000	600.515.000	312.945.000
3002.300201.40.001	Penagihan pajak dan retribusi daerah	226.800.000	234.000.000	(7.200.000)
3002.300201.40.002	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	260.000.000	60.000.000	200.000.000
3002.300201.40.003	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	172.660.000	140.515.000	32.145.000
3002.300201.40.004	Verifikasi BPHTB	144.000.000	98.000.000	46.000.000
3002.300201.40.005	Pemeriksaan pajak daerah	110.000.000	68.000.000	42.000.000
3002.300201.40.006	Gebyar Pajak Daerah	0	-	-
3002.41	PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH	586.500.000	395.705.000	190.795.000
3002.300201.41.001	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	115.000.000	58.000.000	57.000.000
3002.300201.41.002	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	65.000.000	45.000.000	20.000.000
3002.300201.41.003	Fasilitasi MP TP-TGR	32.000.000	30.900.000	1.100.000
3002.300201.41.004	Fasilitasi pelaporan DAK	45.500.000	35.195.000	10.305.000
3002.300201.41.005	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	28.000.000	12.060.000	15.940.000
3002.300201.41.006	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	20.000.000	35.000.000	(15.000.000)
3002.300201.41.007	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	61.000.000	58.050.000	2.950.000
3002.300201.41.008	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	146.000.000	87.500.000	58.500.000
3002.300201.41.009	Pendampingan transaksi non tunai	74.000.000	34.000.000	40.000.000

Tabel 3.4

Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif BKD Kota Pekalongan Tahun 2020

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
300201	BADAN KEUANGAN DAERAH				13.749.183.000				13.270.940.000				
30	URUSAN PENUNJANG				13.749.183.000				13.270.940.000				
3002	KEUANGAN				13.749.183.000				11.497.740.000				11.272.916.000
3002.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	100	persen		Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	100	persen		Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	100		1.590.900.000
3002.300201.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	3.000.000	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	3.000.000	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	6.000.000
3002.300201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	514.200.000	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	506.400.000	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	506.400.000
3002.300201.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	103.000.000	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	103.000.000	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	135.000.000
3002.300201.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	bulan	105.000.000	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	bulan	93.000.000	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	bulan	93.000.000
3002.300201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	bulan	190.000.000	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	bulan	190.000.000	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	bulan	190.000.000
3002.300201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	82.300.000	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	82.300.000	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	50.000.000
3002.300201.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	10.000.000	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	10.000.000	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	5.000.000

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3002.300201.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	13.000.000	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	13.000.000	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	28.000.000
3002.300201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	2.500.000	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	2.500.000	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	2.500.000
3002.300201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	120.000.000	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	120.000.000	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	bulan	100.000.000
3002.300201.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	300	orang/kali	650.000.000	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	300	orang/kali	650.000.000	Jumlah Fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	160	orang/kali	475.000.000
3002.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100	persen	1.441.140.000	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100	persen	591.140.000	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100	persen	586.140.000
3002.300201.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan	3	unit	660.000.000		0		0				-
3002.300201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	1	unit	250.000.000	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	60.000.000	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	80.000.000
3002.300201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	58	unit	166.140.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	58	unit	166.140.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	58	unit	131.140.000
3002.300201.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat	1	unit	200.000.000	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	1	unit	200.000.000	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	150.000.000
3002.300201.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	24	unit	125.000.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	19	unit	125.000.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	53	unit	175.000.000

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3002.300201.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	40.000.000	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	40.000.000	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	50.000.000
3002.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	5	Dokumen	23.500.000	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	5	Dokumen	31.500.000	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	5	Dokumen	23.500.000
3002.300201.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun	6	Laporan	10.000.000	Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun	6	laporan	10.000.000	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	6	laporan	10.000.000
3002.300201.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun	6	Laporan	10.000.000	Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun	6	laporan	10.000.000	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun	6	laporan	10.000.000
3002.300201.06.007	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun	0	Dokumen	0	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun	1	dokumen	8.000.000	Jumlah dokumen profil Perangkat Daerah yang disusun	0	dokumen	-
3002.300201.06.008	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	12	bulan	3.500.000	Jumlah dokumen SPIP yang disusun	5	dokumen	3.500.000	Jumlah dokumen SPIP yang disusun	5	dokumen	3.500.000
										Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	12	bulan	
3002.07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM)	Pengaduan yang diterima	0	kasus	46.640.000	Pengaduan yang diterima	-	kasus	46.640.000	Pengaduan yang diterima	-	kasus	31.640.000
3002.300201.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	1	orang/bulan	31.640.000	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	1	orang/bulan	31.640.000	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	12	orang/bulan	31.640.000
3002.300201.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam pameran	3	kegiatan	15.000.000	Jumlah keikutsertaan dalam pameran	3	kali	15.000.000	Jumlah keikutsertaan dalam pameran	0	DROP	-

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		hakteknas, karnaval batik, dan keterbukaan informasi publik				Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik				Hakteknas, KIP dan Pekan Batik			
3002.36	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan potensi pendapatan	4	persen	2.166.000.000	Persentase peningkatan potensi pendapatan	4	persen	1.977.000.000	Persentase peningkatan potensi pendapatan	4	persen	1.096.970.000
						Presentase Peningkatan Potensi Pendapatan	4	persen					
3002.300201.36.002	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah WP/ WR yang dilayani	2.500	WP/WR	439.000.000	Jumlah WP/ WR yang dilayani	2.500	WP/WR	370.000.000	Jumlah WP/ WR yang terlayani	18000	WP/WR	367.270.000
3002.300201.36.003	Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	89.000	Lembar	106.000.000	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	90.000	Lembar	70.000.000	Jumlah SKPD/SKRD yang dibuat (pajak reklame, pajak ABT dan retribusi yang dikelola BKD)	9000	lembar	55.050.000
3002.300201.36.006	Pemutakhiran data PBB	Jumlah data Objek Pajak PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate	25.000	Data	905.000.000	Jumlah data Objek Pajak PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate	16.000	Data	630.000.000	Jumlah data Objek Pajak PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate	0	drop	122.680.000
		Jumlah Peta Digital PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate	10	Peta		Jumlah Peta Digital PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate	10	Peta		Jumlah Peta Digital PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate	0	drop	
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2020 disusun	1	Buku		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2020 disusun	1	Buku		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2020 disusun	1	buku	
		Jumlah Buku DHKP PBB 2020 yang disusun	94	Buku		Jumlah Buku DHKP PBB 2020 yang disusun	94	Buku		Jumlah Buku DHKP PBB 2020 yang disusun	94	buku	
		Jumlah berkas permohonan Pelayanan PBB yang diproses dan diselesai	2.000	berkas		Jumlah berkas permohonan Pelayanan PBB yang diproses dan diselesaikan	2.000	berkas		Jumlah berkas permohonan Pelayanan PBB yang diproses dan diselesaikan	2000	berkas	
3002.300201.36.008	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12	Laporan	120.000.000	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12	laporan	110.000.000	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12	laporan	105.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun	2	Dokumen		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun	2	dokumen		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	2	dokumen	

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah rakor bidang pendapatan yang diselenggarakan	6	kali		Jumlah rakor bidang pendapatan yang diselenggarakan	6	kali		Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	3	kali	
3002.300201.36.011	Pengembangan SIM pendapatan daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	2	Aplikasi	150.000.000	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	2	Aplikasi	365.000.000	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	0	Aplikasi	90.800.000
		Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan dipeliharaaan	5	Aplikasi		Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan	5	Aplikasi		Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan	5	Aplikasi	
						Jumlah Sistem Informasi baru yang diadakan	2	aplikasi		Jumlah Sistem Informasi baru yang diadakan	0	Aplikasi	
3002.300201.36.012	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	91.000	Lembar	386.000.000	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	92.000	Lembar	325.000.000	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	90000	lembar	299.170.000
3002.300201.36.017	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata	2.000	Objek	60.000.000	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata	2.000	Objek	107.000.000	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata	2000	objek	57.000.000
		Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun	1	Buku		Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun	1	Buku		Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun	1	buku	
						Jumlah Objek Pajak Khusus PBB yang didata	10	OP		Jumlah Objek Pajak Khusus PBB yang terdata	0	OP	
3002.37	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	63	persen	6.339.653.000	persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	63	persen	5.119.500.000	persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	63	persen	5.141.874.000
		Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap	100	persen		Persentase OPD yang menyelesaikan laporan aset tetap	100	persen		Persentase OPD yang menyelesaikan laporan aset tetap	100	persen	
		Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan	100	persen		Persentase OPD yang menyelesaikan laporan persediaan	100	persen		Persentase OPD yang menyelesaikan laporan persediaan	100	persen	
3002.300201.37.001	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	2	Dokumen	100.000.000	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	2	buku	100.000.000	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	2	buku	100.000.000
3002.300201.37.002	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang disusun	2	Buku	50.000.000	Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang disusun	2	buku	50.000.000	Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang disusun	2	buku	50.000.000

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3002.300201 .37.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala	3	unit	75.000.000	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	118.500.000	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	118.500.000
3002.300201 .37.004	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	Jumlah berkas sertifikat tanah yang diajukan	40	bidang	300.000.000	Jumlah Sertifikat yang diajukan	32	bidang	286.000.000	Jumlah Pengajuan Sertifikat	282	bidang	756.850.000
		Jumlah papan nama aset yang diadakan	55	buah		Jumlah papan nama aset yang diadakan	55	buah		Jumlah papan nama aset yang diadakan	0	DROP	
		Jumlah Patok Batas Tanah yang diadakan	600	buah		Jumlah Patok batas tanah yang diadakan	600	patok		Jumlah Patok batas tanah	600	patok	
						Jumlah bidang tanah milik Pemkot yang diinventarisasi	250	bidang		Jumlah bidang tanah milik Pemkot yang diinventarisasi	250	bidang	
3002.300201 .37.005	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok	5	kali	70.000.000	Jumlah lelang garapan eks tanah bengkok yang dilaksanakan	5	kali	67.000.000	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	1	kali	58.800.000
3002.300201 .37.006	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	27	OPD	620.000.000	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	30	OPD	673.000.000	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	30	OPD	622.624.000
		Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	36	Unit Kerja		Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	36	Unit Kerja		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	36	unit kerja	
		Jumlah laporan/data pengelolaan BMD	67	Laporan		Jumlah laporan/data pengelolaan BMD	67	Laporan		Jumlah laporan /data pengelolaan BMD	67	laporan	
		Jumlah pelaksanaan Sensus BMD	1	kali		Jumlah Sensus BMD yang dilaksanakan	1	kali		Jumlah sensus BMD yang dilaksanakan	0	kali	
3002.300201 .37.007	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	100.000.000	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	200.000.000	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	119.100.000
3002.300201 .37.008	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan	3	unit	3.274.253.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan	8	unit	3.245.000.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan	8	unit	3.136.000.000
3002.300201 .37.009	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah	jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan	60	unit	1.370.400.000		0		0		0		-
3002.300201 .37.010	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang direhabilitasi secara rutin/berkala	1	unit	350.000.000	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat	2	unit	350.000.000	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat	2	unit	150.000.000

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3002.300201 .37.011	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	Jumlah mobil aset lainnya yang direhabilitasi	3	unit	30.000.000	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	3	unit	30.000.000	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	3	unit	30.000.000
3002.38	PROGRAM PENYUSUNAN APBD DAN PENGELOLAAN HIBAH BANSOS	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100	persen	1.169.000.000	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100	persen	1.429.000.000	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100	persen	1.116.072.000
		Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100	persen		Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100	persen		Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100	persen	
						Ketersediaan Perda dan Perwal Perubahan APBD yang tepat waktu	100	persen		Ketersediaan Perda dan Perwal Perubahan APBD yang tepat waktu	100	persen	
3002.300201 .38.001	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan	2	Dokumen	358.000.000	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen	350.000.000	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen	291.000.000
		Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan	4	Dokumen		Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	4	dokumen		Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	4	dokumen	
3002.300201 .38.002	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan	2	Dokumen	286.000.000	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen	286.000.000	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen	351.600.000
		Bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan	4	Dokumen		jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	4	dokumen		jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	4	dokumen	
3002.300201 .38.003	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	12	bulan	160.000.000	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	12	bulan	128.000.000	Jumlah laporan realisasi penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial selama satu tahun	12	dokumen	106.000.000
						Jumlah dokumen SOP hibah dan bansos yang disusun	1	dokumen		Jumlah dokumen SOP hibah dan bansos yang disusun	0	DROP	
						Jumlah raperwal santunan kematian yang disusun	1	raperwal		Jumlah raperwal santunan kematian yang disusun	0	DROP	

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3002.300201 .38.004	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	2	kali	105.000.000	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	2	kali	105.000.000	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	2	kali	96.000.000
3002.300201 .38.005	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	66	PD/Unit Kerja	210.000.000	Jumlah asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	66	PD/Unit Kerja	210.000.000	Jumlah pelaksanaan asistensi RKA	2	kali	209.472.000
3002.300201 .38.006	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	12	bulan	50.000.000	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	12	bulan	350.000.000	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	6	kali	62.000.000
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	6	kali		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	6	kali		Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	0	DROP	
3002.39	PROGRAM PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	100	persen	759.600.000	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	100	persen	803.000.000	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	100	persen	689.600.000
3002.300201 .39.001	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	14	Laporan	100.000.000	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	14	Laporan	92.000.000				92.000.000
3002.300201 .39.002	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	Jumlah buku / Perwal yang disusun	1	Buku	50.000.000	Jumlah buku / Perwal yang disusun	1	Buku	50.000.000	Jumlah buku / Perwal yang disusun	0	DROP	-
3002.300201 .39.003	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel	12	bulan	159.600.000	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel	12	bulan	262.000.000	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	67	OPD	247.600.000

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						pendampingan pengembangan aplikasi (SIMRAL)	1	paket		Pendampingan Implementasi dalam pengembangan simral	1	paket	
3002.300201.39.004	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	Jumlah Laporan LO OPD yang disusun	69	Laporan	100.000.000				49.000.000	Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan	0	DROP	
		Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan	14	Laporan						Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran	0	DROP	
		Laporan Keuangan Konsolidasi Semesteran	2	Buku						DIHAPUS			
		Penerima hadiah penyusunan laporan keuangan	16	orang									
						Jumlah Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan yang disusun	7	Laporan		Jumlah Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan yang disusun	7	Laporan	
						Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi Semesteran yang disusun	2	Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi Semesteran yang disusun	2	Laporan	
3002.300201.39.005	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun	2	Dokumen	350.000.000	Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun	2	dokumen	350.000.000	Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun	2	dokumen	350.000.000
						Jumlah rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan	67	PD/Unit Kerja		Jumlah rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan	67	PD/unit Kerja	
						Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (laporan keuangan konsolidasi) yang disusun	6	laporan		Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (laporan keuangan konsolidasi) yang disusun	7	laporan	
						Jumlah publikasi laporan keuangan	1	kali		Jumlah publikasi laporan keuangan	1	kali	

Kode	Urusan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3002.40	PROGRAM PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	100	persen	1.073.000.000	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	100	persen	913.460.000	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	100	persen	600.515.000
		Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi	100	persen		persentase Pencapaian target pendapatan Retribusi	100	persen		persentase Pencapaian target pendapatan Retribusi	100	persen	
3002.300201.40.001	Penagihan pajak dan retribusi daerah	Jumlah objek pajak yang dibayar	21200	objek pajak	245.000.000	Jumlah masa pajak yang dibayar	21.200	objek pajak	226.800.000	Jumlah surat tagihan/ surat pemberitahuan pembayaran/ surat peringatan yang diterbitkan	5100	surat	234.000.000
3002.300201.40.002	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi	300	wajib pajak/ wajib retribusi	260.000.000	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi	150	WP/WR	260.000.000	Jumlah kegiatan penyuluhan pajak dan retribusi daerah yang diadakan	1	kali	60.000.000
3002.300201.40.003	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	12	bulan	180.000.000	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Reklame, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Pajak	50	kali	172.660.000	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Reklame, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Pajak	50	kali	140.515.000
3002.300201.40.004	Verifikasi BPHTB	Jumlah berkas SSPD BPHTB yang diverifikasi	2000	berkas	100.000.000	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	1.500	berkas	144.000.000	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	1000	berkas	98.000.000
3002.300201.40.005	Pemeriksaan pajak daerah	Jumlah WP/WR yang diperiksa	50	wajib pajak/ wajib retribusi	210.000.000	Jumlah Objek Pajak/WP yang diperiksa	12	OP/WP	110.000.000	Jumlah Objek Pajak/WP yang diperiksa	8	OP/WP	68.000.000
3002.300201.40.006	Gebyar Pajak Daerah	Wajib Pajak yang memperoleh penghargaan	15	Wajib Pajak	78.000.000		0		0				-
3002.41	PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD	100	persen	730.650.000	Persentase Penerbitan SP2D atas Pengajuan SPM dari OPD	100	persen	586.500.000	-	100	persen	395.705.000
		Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100	persen		Persentase Pencairan SP2D atas Penerbitan SP2D	100	persen		Persentase Pencairan SP2D atas Penerbitan SP2D	100	persen	
3002.300201.41.001	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	1	sisdur	65.000.000	Jml. Dokumen raperda pengelolaan keuangan daerah yang disusun	1	dokumen	115.000.000	Jml. Dokumen raperda pengelolaan keuangan daerah yang disusun	1	dokumen	58.000.000
3002.300201.41.002	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan	12	bulan	75.000.000	Jumlah bulan pelaksanaan	12	bulan	65.000.000	Jumlah bulan pelaksanaan	12	bulan	45.000.000

Kode	Urutan Program Kegiatan	Renja				APBD				Perubahan Renja			
		Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp	Uraian	K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah				monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah				monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah			
3002.300201.41.003	Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR	12	bulan	50.000.000	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	12	laporan	32.000.000	Jumlah laporan kerugian daerah di MP TP-TGR yang disusun	12	kali	30.900.000
3002.300201.41.004	Fasilitasi pelaporan DAK	jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK	12	bulan	66.650.000	Jumlah laporan DAK per bidang yang disusun	30	laporan	45.500.000	Jumlah laporan DAK per bidang	2	laporan	35.195.000
		Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan	4	Laporan			0			Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan DAK	12	kali	
3002.300201.41.005	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	240	orang	50.000.000	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	240	orang	28.000.000	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	1	kali	12.060.000
3002.300201.41.006	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	3.200	data	20.000.000	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	3.200	data	20.000.000	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	13	kali	35.000.000
3002.300201.41.007	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah bulan kegiatan updating data gaji dan pencetakan daftar gaji PNS se Kota Pekalongan	12	bulan	70.000.000	Jumlah bulan kegiatan updating data gaji dan pencetakan daftar gaji PNS se Kota Pekalongan	12	bulan	61.000.000	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	67	PD/Unit Kerja	58.050.000
3002.300201.41.008	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	67	PD/Unit Kerja	244.000.000	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	67	PD/Unit Kerja	146.000.000	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	67	PD/Unit Kerja	87.500.000
3002.300201.41.009	Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah bulan pendampingan transaksi non tunai	12	bulan	90.000.000	Jumlah bulan pendampingan transaksi non tunai	12	bulan	74.000.000	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/ Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	4	kali	34.000.000

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan, serta dan sebagai panduan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020. Penyusunan Perubahan Renja 2020 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan ini dapat menjadi sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan Perubahan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah Kota Pekalongan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 ini masih memerlukan penyempurnaan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Pekalongan, Agustus 2020
Kepala BKD Kota Pekalongan,



Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631111 198902 1 005